

Warga Menggugat: Studi Kasus Gerakan Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Anggun Dewi Rahmawati*

ABSTRAK

Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) merupakan forum yang dibentuk oleh warga desa Suci sebagai wadah menyampaikan aspirasi mereka kepada perangkat desa Suci. Masyarakat desa Suci menganggap perilaku perangkat desa Suci yang bertindak secara sewenang-wenang terhadap warga desa Suci, sehingga masyarakat desa Suci melakukan gerakan massa melalui Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS). Gerakan massa merupakan suatu tindakan yang dilakukan masyarakat yang disebabkan oleh ketidaksepahaman dengan tindakan pemimpinnya. Hal ini merupakan suatu bentuk perlawanan dari kaum-kaum yang tertekan dan hidupnya didasari oleh rasa ketidakadilan dan kekecewaan yang mendalam untuk menuntut perubahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di desa Suci secara sistematis, faktual dan akurat. Teknik analisis data bersifat kualitatif karena informasi didapatkan secara langsung dari informan yang terkait.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesewenang-wenangan yang dilakukan perangkat desa Suci membuat warga desa Suci membentuk forum musyawarah untuk menyampaikan aspirasi mereka. Permasalahan yang muncul di desa Suci antara lain masuknya pengeboran PT. Petrochina di desa Suci, perebutan tanah antara pemerintah desa Suci dengan pemerintahan Kabupaten Gresik hingga kasus penjualan Tanah Kas Desa (TKD). Hal ini melatarbelakangi gerakan massa yang dilakukan warga desa Suci untuk menuntut keadilan, sehingga Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) dijadikan suatu upaya warga desa Suci untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di desa Suci. Permasalahan yang terjadi di desa Suci berawal dari isu individu menjadi isu di masyarakat luas, sehingga Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) berupaya untuk melakukan proses pembingkaihan isu yang beredar di masyarakat. Langkah Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) mendapat dukungan dari organisasi-organisasi masyarakat yang ada di desa Suci seperti Fatayat, Nahdlatul Ulama, Anshor, Muslimat NU dan IPNU. Pada awal perkembangan Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) mengalami pasang surut dalam melakukan gerakannya. Gerakan Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) sempat mengalami vakum setelah terselesaikannya kasus pengeboran PT. Petrochina di desa Suci. Namun, Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) memunculkan gerakannya kembali setelah munculnya kasus-kasus baru seperti perebutan tanah desa Suci antara pemerintah Kabupaten Gresik dengan pemerintah desa Suci.

Kata kunci: Gerakan, Gerakan Forum Komunikasi Warga Suci

ABSTRACT

Citizens Communication Forum Saints (FKWS) is a forum set up by the Bible as the container of the villagers expressed their aspirations to the holy village. Villagers Sacred Scripture considers the behavior of the villagers who act arbitrarily against villagers Holy Scripture so that the villagers do mass movements through the Holy People Communication Forum (FKWS). The mass movement is an action taken by the society due to disagreement with the actions leaders. This is a form of resistance from the families of the repressed and life based on a sense of injustice and a deep disappointment to demand changes to be better than ever. Researchers used the descriptive method to describe the facts that occurred in the village of Holy systematic, factual and accurate. Qualitative data analysis techniques as information obtained directly from the relevant informants. From this study show that abuses carried out of the village to make the villagers Sacred Scripture form discussion forum to express their aspirations. The problems that arise in the village such as the entry of drilling Sacred PT. Petrochina Holy village, villagers over a land dispute between the government and the Holy Gresik regency administration until the sale of the Village Land Cash (TKD). It is behind the mass movement which carried the Holy villagers to demand justice, so that the Holy People Communication Forum (FKWS) made an effort to Holy villagers to resolve any problems that occurred in the village of Saint.

The problems that occurred in the village of Scripture begins with the individual issues become an issue in the wider community, so that the Holy People Communication Forum (FKWS) attempt to make the process of framing the issues circulating in the community. Step Citizens Communication Forum Saints (FKWS) received support from community organizations in the village such as the Holy Fatayat, NU, Anshor, Muslimat NU and IPNU. In the early development of the Citizens Communication Forum Saints (FKWS) ups and downs of doing the movement. Sacred Movement Citizens Communication Forum (FKWS) had experienced a vacuum after the completion of drilling case PT. Petrochina Holy village. However, the Holy People Communication Forum (FKWS) raises his movement after the emergence of new cases as a land grab between the holy village to village government Gresik Scriptures.

Keywords: Movement, Movements Citizens Forum Communications Saints

* Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, email: lovely_cemen@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pasca kepemimpinan Soeharto pada tahun 1998, kehidupan politik di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kehidupan politik pada masa Orde baru terkesan menutup diri, rakyat dijauhkan dari segala bentuk aktifitas politik. Segala peraturan wajib ditaati tanpa ada sedikit perlawanan dari rakyat. Negara yang sebelumnya memberikan kesan menakutkan bagi rakyat Indonesia kini tidak lagi terjadi. Pasca kepemimpinan Soeharto tidak ada lagi pendominasian salah satu pihak terhadap pihak lainnya, keduanya berjalan secara seimbang.

Ruang kebebasan rakyat terbuka lebar, penguasa yang mengabaikan rakyatnya dan apabila segala kebijakannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka akan mendapatkan balasan perlawanan. Rakyat memiliki keberanian untuk melakukan segala tindakan perlawanan, karena saat ini rakyat mempunyai kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan bebas melakukan sebuah perlawanan apabila aspirasinya tidak di dengar. Rakyat yang melakukan aksi perlawanan akan membentuk suatu gerakan untuk menyampaikan aspirasinya.

Maraknya kasus gerakan massa di Indonesia banyak dijumpai dalam wilayah perkotaan yang merupakan pusat kehidupan pemerintahan, namun kasus gerakan massa bukan hanya berkembang dalam wilayah perkotaan, bahkan dipedesaan kasus gerakan massa saat ini banyak dijumpai. Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa sebagai komunitas adat maupun sebagai unit pemerintahan terendah telah membuktikan dirinya memiliki peran penting, baik di masa perjuangan maupun pasca kemerdekaan, namun ironisnya desa yang strategis dan sering disebut memiliki otonomi asli tersebut oleh penguasa lebih ditempatkan sebagai objek kekuasaan daripada sebagai subjek.¹

Di pedesaan fenomena gerakan terkadang menitikberatkan pada gerakan dengan menempatkan petani sebagai aktor utama, namun saat ini fenomena perubahan orientasi gerakan sosial, munculnya aktor-aktor baru tidak lagi bersentuhan dengan masalah pertanian dan saat ini dilakukan oleh organisasi masyarakat. Masalah sengketa lahan, pembangunan dan pergusuran tanpa ijin masih sering terjadi, namun perlawanan masyarakat

tidak hanya berkuat pada masalah itu saja, tetapi juga pada penyalahgunaan wewenang kekuasaan, manipulasi, kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan, tidak adanya transparansi, nepotisme, korupsi yang dilakukan oleh pemimpin desa serta tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat desa.

Perlawanan masyarakat atas pemerintahan kepala desanya merupakan salah satu bentuk dari partisipasi rakyat. Hal ini seperti yang telah terjadi di desa Suci yang terletak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dimana masyarakat desa Suci menuntut atas penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh mantan kepala desa. Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh mantan kepala desa membuat masyarakat Desa Suci melakukan aksi protes agar mantan kepala desa tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas segala kesewenang-wengannya.

Masyarakat desa Suci semakin merasakan ketidaknyamanannya pada periode kedua kepemimpinan mantan kepala desa. Pada periode kedua mantan kepala Desa Suci mengalami perubahan pada pola kepemimpinannya. Model kepemimpinannya bersifat otoriter sama dengan kepemimpinan pada masa Soeharto. Hal ini dialami oleh masyarakat desa Suci, mantan kepala desa Suci yang mulai memunculkan sikap otoriternya terhadap masyarakat desa Suci. Kebijakan-kebijakan dibuat oleh mantan kepala desa beserta perangkat desa tanpa melibatkan masyarakat didalamnya, bahkan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan desa dimana seharusnya melibatkan masyarakat secara langsung tidak dilakukan. Kebijakan yang dibuat tidak dapat diganggu gugat oleh masyarakatnya.

Tindakan yang dilakukan semakin membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan rasa kepercayaan terhadap mantan kepala desa semakin hilang. Dengan pola kepemimpinan seperti itu dan banyaknya permasalahan terjadi di Desa Suci dimana selalu melibatkan mantan kepala desa, menjadikan masyarakat desa Suci yang mempunyai intelektual tinggi dan sadar akan politik berusaha untuk melakukan suatu perlawanan kepada mantan kepala desa.

Masyarakat yang sadar akan keterlibatan mantan kepala desa dalam setiap permasalahan yang terjadi di desa Suci, membentuk suatu gerakan yang dapat dijadikan sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasinya serta memperjuangkan hak-hak

masyarakat desa Suci.

Masyarakat desa Suci membentuk suatu wadah yang dinamakan dengan Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) yang merupakan kumpulan dari seluruh element masyarakat di desa Suci, dimana mempunyai tujuan sama yaitu untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan tentunya kontra terhadap kepemimpinan mantan kepala desa. Dari forum inilah masyarakat desa Suci menghimpun dukungan dan masukan dari masyarakat desa Suci untuk melakukan aksi protes terhadap segala permasalahan yang disebabkan oleh kesewenang-wenangan yang dilakukan mantan kepala desa Suci.

Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) terbentuk setelah munculnya segala permasalahan yang disebabkan oleh kesewenang-wenangan mantan kepala desa yang berawal dari kasus masuknya pengeboran migas oleh PT. Petrochina dimana melibatkan mantan kepala desa. Kehadiran pengeboran migas yang dilakukan oleh PT. Petrochina di desa Suci secara tiba-tiba telah menimbulkan beraneka macam pertanyaan masyarakat, karena kehadiran pengeboran migas oleh PT. Petrochina di desa Suci telah dilegalkan dan mendapatkan persetujuan masyarakat, namun kenyataannya masyarakat tidak menyetujui kehadiran PT. Petrochina karena adanya pengeboran itu masyarakat mengalami ketakutan akan tragedi lumpur lapindo terjadi di desa Suci. Data yang seharusnya benar untuk dijadikan dasar persetujuan masyarakat adalah hasil manipulasi mantan kepala desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi dengan menggunakan kekuasaannya.

Pada akhir tahun 2010, PT. Petrochina berencana melakukan pengeboran tahap kedua di wilayah desa Suci. PT. Petrochina akan menyewa lahan yang berada di wilayah desa suci, saat itu terjadi tarik menarik kepentingan antara pihak pemerintahan desa dengan pemerintah Kabupaten Gresik (pemkot). Saat itu terdapat provokasi yang dilakukan oleh mantan kepala desa, sehingga proses sertifikasi untuk menjadikan tanah negara itu menjadi tanah kas desa tidak kunjung selesai. Dengan adanya persoalan itu, Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) mulai membicarakan kasus ini dengan menjadikan kasus jual beli Tanah Kas Desa (TKD) Suci yang terjadi pada tahun 2003 hingga 2004 yang dinilai merugikan masyarakat

desa Suci sebagai kasus yang dapat menyeret mantan kepala desa ke ranah hukum. Dari beberapa kasus mantan kepala desa, kasus jual beli tanah kas desa pada tahun 2003-2004 merupakan kasus yang diangkat oleh gerakan Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) untuk dapat memasukkan mantan kepala desa ke dalam penjara, karena kasus korupsi ini sangat merugikan masyarakat hingga mencapai angka milyaran rupiah.

Dalam latar belakang diatas, maka menimbulkan tiga rumusan masalah:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi gerakan Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) di Desa Suci?
2. Bagaimana upaya Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) dalam merespon kasus tukar guling tanah kas Desa Suci yang terjadi pada tahun 2003-2004?
3. Bagaimana dinamika gerakan sosial Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) di Desa Suci hingga saat ini?

KAJIAN TEORITIK

Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan suatu bentuk perlawanan dari kaum-kaum yang tertekan dan hidupnya didasari oleh rasa ketidakadilan dan kekecewaan yang mendalam untuk menuntut suatu perubahan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Gerakan sosial sebagai bentuk politik perlawanan yang terjadi ketika seseorang bergabung dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai pengaruh yang dapat menggalang kekuatan untuk melawan para pemimpin yang tidak sepaham dengan keinginan rakyat, dimana masyarakat desa Suci mulai merasakan kekecewaan yang mendalam kepada mantan kepala desanya sehingga membentuk suatu aksi perlawanan.

Dalam menjawab tiga rumusan masalah penelitian ini, menggunakan beberapa teori gerakan sosial. Menurut penuturan dari Neil J. Smelser, ia menyebutkan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gerakan sosial. *Structural condusiveness*: Gerakan sosial bermula karena adanya struktur yang mendukung. *Structural strain*: Gerakan massa semakin tidak terbendung apabila struktur kondusif menimbulkan ketegangan structural. *The growth of a generalized belief*: Ketegangan

structural belum mencukupi dalam menghasilkan tindakan kolektif. Gerakan sosial dapat diwujudkan dan memerlukan penjelasan mengenai permasalahan dan solusinya. Dalam konteks ini, interaksi sosial sangat diperlukan untuk saling bertukar pikiran dalam merespon persoalan yang dihadapi bersama.

Dalam dinamika gerakan sosial, ada tiga aspek yang dapat mempengaruhi dinamika gerakan sosial yaitu peluang atau kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses pembingkai.

PEMBAHASAN

Daya dorong Gerakan Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) Dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi dan mempercepat terjadinya gerakan massa yang dipelopori oleh gerakan Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS). Faktor pertama adalah terdapat kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh perangkat desa Suci. Pada tahun 1990 dalam pemilihan kepala desa, Syaifudin Zuhri terpilih menjadi kepala desa Suci menggantikan Bapak Afwan yang memerintah selama dua periode pada tahun 1971 hingga 1989. Awalnya pemerintahan Syaifudin Zuhri sebagai kepala desa Suci berjalan lancar dan dianggap masyarakat pemerintahan Syaifudin Zuhri ini tanpa ada suatu halangan. Semakin bergulirnya waktu, pada periode pertama pemerintahannya semakin menunjukkan kesewenang-wenangnya dalam memerintah.

Masyarakat desa Suci mulai merasakan kekecewaan dalam pemerintahan Syaifudin Zuhri karena tidak terdapat transparansi mengenai segala laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada masyarakat desa. Prinsip musyawarah dan mufakat banyak merupakan khayalan belaka, karena rapat desa atau sosialisasi desa yang berkaitan dengan pembangunan desa tidak didapati dalam pemerintahan Syaifudin Zuhri. Selain itu terdapat intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh perangkat desa apabila didapati masyarakat yang menentang kebijakannya, sehingga membuat masyarakat merasakan ketidaknyamanan. Segala perlakuan akan di dapat masyarakat apabila berani mengkritisi terhadap pemerintahan Syaifudin Zuhri pada saat itu.

Masyarakat desa yang seharusnya

menaruh kepercayaan kepada pemerintahan Syaifudin Zuhri ini tidak terwujud, kepercayaan itu hilang oleh tindakan-tindakan Syaifudin Zuhri sendiri yang semasa pemerintahannya tidak pernah ada transparansi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa. Seharusnya setiap melakukan sesuatu yang mengatasnamakan desa didalamnya, desa harus menerima laporan pertanggungjawaban untuk di sampaikan kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi. Sosialisasi dan rapat desa yang seharusnya dilakukan tidak pernah dilakukan oleh Syaifudin Zuhri, sosialisasi dan rapat desa itu hanya dilakukan kepada perangkat-perangkatnya saja yang sejalan dengan Syaifudin Zuhri. Sehingga masyarakat semakin merasakan kekecewaan mendalam oleh tingkah laku Syaifudin Zuhri dalam kesewenang-wenangnya.

Keotoriteran Syaifudin Zuhri mirip dengan keotoriteran Soeharto pada massa orde baru, apabila kebijakannya di tentang maka ia tidak akan segan-segan melakukan teror, intimidasi dan juga menculik para aktivis yang menentangnya. Begitu juga Syaifudin Zuhri, ia akan mendatangkan preman-preman untuk masyarakat desa yang berusaha menentang dan mengkritisnya.

Pada periode pertama yang membuat masyarakat desa kurang simpati kepada pemerintahan Syaifudin Zuhri, karena kepercayaan mereka hilang dan semakin diperkuat lagi dalam periode kedua Syaifudin Zuhri menjabat sebagai kepala desa. Pada periode kedua ini membuat Syaifudin Zuhri semakin menunjukkan kesewenang-wenangan dalam kekuasaannya. Bukan lagi masyarakat desa Suci mempertanyakan perihal transparansi selama menjabat dan segala pertanggungjawaban kepada desa, tetapi Syaifudin Zuhri dalam pola kepemimpinannya menunjukkan sikap otoriter dan mulai melakukan tindakan korupsi yang sangat merugikan desa.

Menurut penuturan dari Neil J. Smelser, ia menyebutkan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gerakan sosial. Pertama, *Structural condusiveness* (struktur kondusif) adalah Gerakan sosial bermula karena adanya struktur yang mendukung. Desa Suci yang semula kondisi desanya stabil, tenang, nyaman kemudian karena kewenangan-kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh

Syaifudin Zuhri dimana dua kali berturut-turut menjabat sebagai kepala desa membuat keadaan stabil itu menjadi tegang. Masyarakat tidak lagi mempercayai Syaifudin Zuhri karena masyarakat merasa kecewa terhadap pemerintahannya yang tidak terdapat transparansi laporan kepada masyarakat desa. Belum lagi apabila rapat yang berkaitan dengan desa, masyarakat tidak pernah diikutsertakan dalam sosialisasi. Kedua dalam teori *Structural strain* (ketegangan struktural) bahwa suatu Gerakan massa semakin tidak terbendung apabila struktur kondusif menimbulkan ketegangan struktural. Keadaan masyarakat desa Suci yang semakin tertekan dengan segala bentuk kesewenang-wenangan Syaifudin Zuhri, sehingga masyarakat Suci hanya bisa diam mengikuti alur pemerintahannya.

Desa Suci pada saat itu terjadi ketegangan, apabila masyarakat tidak setuju atau seirama dengan segala kebijakan Syaifudin Zuhri apalagi mengkritisnya dapat dipastikan masyarakat tersebut akan mendapatkan intimidasi serta teror. Kenyataan itulah ketakutan yang dirasakan masyarakat Suci sangat besar akibat dari kesewenang-wenangan Syaifudin Zuhri, sehingga semakin membuat masyarakat ingin melakukan suatu perlawanan yang dipelopori oleh gerakan FKWS.

Faktor kedua yang melatarbelakangi dan semakin membuat masyarakat desa Suci untuk melakukan aksi perlawanannya adalah masuknya pengeboran migas yang dilakukan oleh PT. Petrochina. Munculnya gerakan FKWS ini pertama kali ditandai dengan masuknya pengeboran migas yang dilakukan oleh PT. Petrochina di wilayah desa Suci. Pihak PT. Petrochina mempunyai dugaan bahwa terdapat minyak dan gas bumi di wilayah desa Suci, sehingga PT. Petrochina melakukan pengeboran migas.

Pengeboran migas yang dilakukan PT. Petrochina terjadi pada tahun 2006. Pengeboran migas datang ke desa Suci sehingga membuat ketakutan dan kenyamanan masyarakat terganggu, karena masyarakat mempunyai rasa kekhawatiran serta ketakutan mendalam apabila terjadi seperti kasus lumpur lapindo di kabupaten Sidoarjo yang mengakibatkan masyarakat Sidoarjo kehilangan seluruh harta bendanya.

Masuknya PT. Petrochina ini memunculkan berbagai pandangan masyarakat

Suci hingga menjadi pertanyaan masyarakat adalah pihak PT. Petrochina sudah mendapatkan izin dari pemerintahan desa Suci yang pada waktu itu masih di jabat oleh Syaifudin Zuhri. Pihak PT. Petrochina sudah mendapatkan izin dan mengatakan bahwa 92 % masyarakat desa Suci setuju dengan pengeboran migas yang dilakukan oleh PT. Petrochina. Jouhan Farhad selaku ketua FKWS memandang masuknya PT. Petrochina ke wilayah desa Suci ini terdapat kecurangan di dalamnya dan di duga dilakukan oleh Syaifudin Zuhri.

Menanggapi kecurangan tersebut, FKWS yang di ketuai Jouhan Farhad mulai mengadakan forum diskusi untuk membahas masalah masuknya pengeboran PT. Petrochina yang diduga terdapat kecurangan didalamnya. Dalam rapat itu di hadiri oleh seluruh element masyarakat desa Suci yang tidak sejalan dengan pikiran mantan kepala desa, Syaifudin Zuhri.

Langkah awal yang dilakukan oleh gerakan FKWS dalam merespon permasalahan yaitu dengan melakukan angket kepada masyarakat desa Suci, dimana pembagian angket tersebut di tugaskan kepada koordinasi wilayah (korwil) yang sudah di bentuk oleh FKWS. Dalam melakukan angket tentang uji kelayakan pengeboran, FKWS terlebih dahulu meminta izin kepada Syaifudin Zuhri ternyata FKWS diberikan izin untuk menyebarkan angket kepada masyarakat. Dari hasil angket yang di sebar kepada masyarakat itu menunjukkan kenyataan sebaliknya bahwa 92% masyarakat desa Suci tidak menyetujui hadirnya pengeboran migas yang dilakukan PT. Petrochina di desa Suci, karena masyarakat merasa tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintahan desa tentang pengeboran minyak ini, apa itu dampak-dampaknya yang di timbulkan dari gas-gas dan ledakan pada saat pengeboran berlangsung, apa jaminan keselamatan yang diberikan kepada masyarakat, apa bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh PT. Petrochina apabila terjadi seperti kasus lumpur lapindo di Sidoarjo, dan apa kompensasi yang di dapatkan masyarakat desa.

Dari sinilah timbul suatu pandangan bahwa perijinan yang di dapatkan PT. Petrochina dari pemerintahan desa hanya suatu manipulasi data saja. Sehingga rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa semakin besar dan mempunyai semangat tinggi untuk

melakukan suatu aksi perlawanan. Masuknya pengeboran migas yang dilakukan PT. Petrochina sehingga menyebabkan FKWS bergerak mengalami beberapa tekanan serta ancaman di dapat dari oknum-oknum yang tidak senang dengan segala tindakan FKWS. Dengan berbagai macam bentuk ancaman serta tekanan yang di dapat FKWS, tidak menjadikan gerakan FKWS takut dan mundur, tetapi malah menjadikan gerakan FKWS semakin kuat dan semangat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat desa dari bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Syaifudin Zuhri.

Pada teori *The Mobilization of participant for action* oleh Neil J. Smelser, cara mobilisasi yang dilakukan FKWS untuk merekrut massa cukup mudah, karena perkembangan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Syaifudin Zuhri semakin besar. Terakhir, semakin banyak ancaman dan tekanan yang diterima oleh FKWS terutama yang aktif dalam forum ini tidak menjadi ketakutan bagi mereka, sebaliknya maka semakin besar semangat untuk terus melakukan perlawanan.

Dalam kasus Pengeboran migas yang dilakukan oleh PT. Petrochina di wilayah desa Suci, gerakan FKWS mempunyai beberapa tuntutan yang diberikan kepada pihak PT. Petrochina yang mana tuntutan tersebut sebagai kompensasi yang di berikan kepada masyarakat desa Suci dan sekitarnya. Mengingat dampak-dampak yang ditimbulkan sangat besar seperti kejadian lumpur lapindo yang terjadi di kabupaten Sidoarjo. Sekelompok orang yang akan melakukan Gerakan sosial tentu saja mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai, jarang sekali mereka melakukan suatu gerakan hanya karena ikut-ikutan saja tanpa adanya suatu tujuan. Mustahil apabila suatu gerakan tanpa adanya suatu tujuan dan tuntutan.

Faktor selanjutnya yang melatarbelakangi dan semakin membuat masyarakat desa Suci menyadari atas kesewenang-wenangan yang dilakukan Syaifudin Zuhri untuk semakin bergerak melakukan perlawanan adalah dengan munculnya kasus perebutan tanah Negara antara pemerintahan desa Suci dengan pemerintahan Kabupaten Gresik. Permasalahan pengeboran yang dilakukan oleh PT. Petrochina pada tahun 2006 dimana berujung damai dan masyarakat desa Suci tidak lagi memperlakukan kehadirannya di tengah-tengah penduduk.

Hingga pada tahun 2010 pasca pemerintahan Syaifudin Zuhri, muncul permasalahan baru yang terjadi sehingga kembali mengusik ketenangan masyarakat desa Suci.

Pada tahun 2010, terjadi permasalahan tentang perebutan Tanah Negara yang berada di wilayah desa Suci antara pemerintahan desa dengan Pemerintah kota Gresik. Padahal selama ini area tersebut dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian oleh masyarakat sekitar. Selama ini, lahan seluas tiga hektar tersebut nyaris tidak pernah diributkan baik oleh Pemerintahan kabupaten Gresik maupun Pemerintah Desa Suci, namun sejak lahan tersebut disewa oleh Joint Operating Body PT. Pertamina Petrochina East Java (JOB-PPEJ) barulah persoalan mencuat.² Dimana pada saat itu akan dilakukan pengeboran tahap kedua yang dilakukan di desa Suci.

Masyarakat bersedia menyewakan tanah negara yang bebas itu kepada PT. Petrochina asalkan bersedia bertanggungjawab ketika ada kebocoran gas, bersedia memberikan kompensasi, masyarakat diberikan sosialisasi tentang pengeboran dan juga dilibatkan dari awal hingga akhir kegiatan, sehingga masyarakat tidak mengalami kekhawatiran yang mendalam. Awalnya kondisi berjalan lancar tanpa hambatan, namun karena masuknya banyak faktor dan kepentingan-kepentingan di dalamnya mengingat tanah negara itu sifatnya bebas dan PT. Petrochina menyewa tanah tersebut dengan biaya yang cukup tinggi yaitu sebesar 2,7 Milyar selama tiga tahun. Melihat biaya sewa yang diberikan oleh PT. Petrochina cukup tinggi dan barang siapa yang tidak tertarik, sehingga tanah tersebut di perebutkan oleh banyak pihak yang mempunyai kepentingan seperti pemerintah Kabupaten Gresik dan pemerintah desa Suci.

Awal dari permasalahan ini adalah ketika kepala desa Suci, M. Rizal melakukan perjanjian dengan management PT. Petrochina untuk menyewakan lahan tersebut dalam rangka kegiatan eksplorasi migas selama tiga tahun. Tetapi menurut pemerintahan kabupaten Gresik, M. Rizal selaku kepala desa Suci telah 'lancang' menyewakan tanah tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari Bupati Gresik dan Gubernur Jawa Timur karena status tanah tersebut adalah tanah negara.

Dalam hal ini pemerintah kabupaten Gresik yang notabene ingin menyelamatkan

tanah negara dan menjadikan sebagai salah satu aset pendapatan kota Gresik. Disisi lain, masyarakat desa menginginkan tanah negara itu dijadikan sebagai salah satu aset atau sumber pendapatan desa, karena keberadaan tanah itu sudah ratusan tahun dan dirawat oleh masyarakat desa, tidak sedikit masyarakat yang menjadikan area tersebut untuk mencari penghasilan yaitu dengan cara menjadi penambang kapur. Karena itulah pemerintah desa Suci menginginkan tanah negara itu bersertifikat atas nama desa Suci. Dalam proses menjadikan tanah Negara itu menjadi tanah kas desa, dalam prosedurnya pasti melewati birokrasi pemerintah Kabupaten Gresik, namun karena adanya provokasi dari beberapa pihak akhirnya pembuatan sertifikat tanah atas nama desa Suci menjadi terhambat hingga satu setengah tahun lamanya tanpa adanya kejelasan.

Gerakan FKWS berunjuk rasa mendesak pemerintah desa Suci yang saat itu sudah dijabat oleh M. Rizal untuk menanyakan perihal kelambanan pihak pemerintah desa dan segera menginginkan sertifikat tanah Negara menjadi tanah kas desa. Keterlambatan pemerintah desa Suci dalam menangani kasus perebutan ini karena memang ada provokasi yang diketahui dilakukan oleh mantan kepala desa. Setelah masyarakat mengerti bahwa kelambanan pemerintahan desa karena adanya provokasi-provokasi yang dilakukan oleh mantan kepala desa, akhirnya masyarakat desa dipelopori gerakan FKWS bersatu untuk mendukung pemerintah desa berjuang bersama-sama dalam menjadikan tanah negara yang kabarnya sudah diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Gresik untuk menjadi tanah kas desa Suci.

Adanya suatu penghalang yang menjadikan proses pembuatan sertifikat lamban, maka harus segera disingkirkan. Namun untuk menyingkirkan mantan kepala desa pada saat itu tidaklah mudah karena masyarakat tidak memiliki bukti dan data yang kuat, apalagi berhadapan dengan kekuatan besar, sehingga kecil kemungkinan untuk memenjarakan mantan kepala desa. Untuk itu FKWS yang di dukung oleh pemerintah desa Suci mencuatkan kembali kasus jual beli tanah kas desa pada tahun 2003-2004 dimana pada saat itu kasusnya tidak tercuat karena minimnya bukti.

Hingga saat ini belum menemukan titik temu dan keputusan apakah tanah negara itu

menjadi aset pendapatan desa Suci atau menjadi aset pendapatan pemerintahan kabupaten Gresik, namun masyarakat tidak pernah berhenti semangat dalam memperjuangkan tanah negara itu menjadi tanah kas desa. Apabila persoalan perebutan tanah ini tidak terselesaikan, mungkin akan berimbas terhadap kepercayaan masyarakat desa Suci kepada kinerja pemerintahan Bupati Sambari.

Dari isu individu menuju isu kolektif

Titik awal dari segala permasalahan yang terjadi di desa Suci hingga terjadi beberapa aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat dengan dipelopori oleh FKWS, seperti masuknya pengeboran migas yang dilakukan oleh PT. Petrochina pada tahun 2006, kemudian perebutan tanah negara antara pemerintah kabupaten Gresik dengan pemerintah desa Suci yang hingga saat ini kasus perebutan tanah tersebut belum menemukan titik temu merupakan titik jenuh masyarakat dalam kasus jual beli tanah kas desa pada tahun 2003 hingga 2004.

Pada kasus tahun 2003 hingga 2004 tentang tukar guling tanah kas desa Suci atau disebut dengan ruislag, dimana pada saat itu terdapat dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa, Syaifudin Zuhri dimana menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk dapat melakukan kesewenang-wenangannya. Kasus ini sempat mereda karena tidak adanya bukti dan data yang cukup kuat untuk menahan Syaifudin Zuhri. Munculnya gerakan FKWS yang lahir pada tahun 2006 dan didukung dengan lengsernya Syaifudin Zuhri dari kepemimpinannya, FKWS mulai mencari data, bukti serta saksi untuk dapat menahan Syaifudin Zuhri.

Dari seluruh rentetan kasus yang terjadi di desa Suci dimana mantan kepala desa dianggap turut berperan dan disinyalir sebagai 'dalang' dari permasalahan yang terjadi, hingga FKWS mengadakan suatu forum diskusi untuk membahas permasalahan ini. Forum tersebut dihadiri seluruh element masyarakat yang mendukung FKWS dan pemerintah desa. Dalam forum tersebut juga membahas apa solusi dari permasalahan ini yang mana sempat pada tahun 2004 dibentuk forum masyarakat yang dikoordinasi oleh Mursidul Ibad, forum warga merupakan forum yang dibentuk bersama yang memiliki tujuan untuk mengawasi dan

mengkritisi kepemimpinan Syaifudin Zuhri yang dianggap menggunakan kekuasaannya untuk bertindak sewenang-wenang. Namun Forum masyarakat ini tidak berhasil untuk menahan Syaifudin Zuhri, karena tidak adanya data dan bukti yang kuat hingga kasus ini pun reda dengan sendirinya.

Dalam kasus ini, upaya yang dilakukan FKWS selain mencari data dan bukti dari PT. Bumi Lingga Pertiwi, sempat juga melakukan panggilan yang bersifat kekeluargaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Suci dan FKWS kepada Syaifudin Zuhri tidak pernah dianggap. Walaupun Syaifudin Zuhri pernah melakukan kompromi dengan ketua FKWS secara pribadi, tetapi kompromi tersebut tidak membuahkan hasil, karena Syaifudin Zuhri meminta agar FKWS dapat menghentikan aksinya. FKWS bersedia untuk menghentikan aksinya apabila Syaifudin Zuhri juga bersedia untuk tidak menghambat lagi pembangunan di desa Suci, tidak lagi ikut campur dalam penyelesaian sertifikat tanah negara dan bersedia untuk menyerahkan diri dalam kasus penjualan tanah kas desa pada tahun 2003 itu dibawa ke jalur hukum. Namun Syaifudin Zuhri masih saja tidak menghiraukan permintaan FKWS, hingga akhirnya FKWS tidak mempunyai rasa belas kasihan lagi terhadap Syaifudin Zuhri.

Kepercayaan masyarakat kepada FKWS semakin besar karena FKWS mampu untuk meyakinkan masyarakat dari yang berawal isu-isu hingga menjadi suatu kebenaran. Beberapa solusi yang di tawarkan dan tindakan yang dilakukan, namun tak kunjung membuat Syaifudin Zuhri jera sehingga semakin membangun kesadaran masyarakat bahwa Syaifudin Zuhri harus cepat-cepat untuk dipenjarakan. Setelah data, bukti dan saksi kuat, serta kepercayaan masyarakat sudah terbangun, gerakan FKWS siap untuk melakukan aksi perlawanannya. Dalam melakukan aksi demonstrasi agar aksi tersebut berhasil, maka FKWS melakukan beberapa strategi agar gerakan tersebut semakin kuat, untuk itu diskusi dan sosialisasi yang dilakukan FKWS kepada masyarakat adalah salah satu cara untuk mengembangkan ideologi masyarakat, disini FKWS menyusun segala isu-isu yang berkembang untuk dianalisa dan kemudian di bingkai menjadi suatu pemahaman. Sehingga masyarakat yang dulunya tidak ikut bergabung mulai sadar dan akhirnya ikut bergabung dalam

aksi FKWS.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh FKWS dalam kasus jual beli tanah kas desa yang dilakukan oleh Syaifudin Zuhri kepada pihak pengembang perumahan PT. Bumi Lingga Pertiwi pada tahun 2003-2004 membuahkan hasil. Keinginan masyarakat desa untuk memenjarakan Syaifudin Zuhri akhirnya terwujud, walaupun hasil yang di dapat tidak memuaskan dan masih merasakan kekecewaan atas keputusan hakim atas hukuman yang diberikan kepada Syaifudin Zuhri.

Pasang surut Gerakan Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS)

Gerakan massa di desa Suci dalam perjalanannya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat desa Suci dari kesewenang-wenangan dan permasalahan yang terjadi di desa Suci mengalami pasang surut. Bermula pada tahun 2005 dimana berdirinya Forum warga dengan diketuai oleh Mursidul Ibad, Forum warga bertujuan untuk menyikapi kondisi pemerintahan Syaifudin Zuhri selaku mantan kepala desa Suci yang tidak stabil dan telah melakukan segala kesewenang-wenangnya.

Ketidakefektifan Forum warga dalam menangani permasalahan yang ada dikarenakan pada saat itu pemerintahan Syaifudin Zuhri sangat besar dan kuat, sehingga masyarakat tidak dapat berbuat banyak. Karena dirasa bahwa tindakan tidak akan membuahkan hasil, maka Forum warga pun akhirnya tenggelam. Syaifudin Zuhri pada akhirnya dengan bebas menggunakan kekuasaannya untuk melakukan segala kesewenang-wenangan.

Dalam teori peluang atau kesempatan politik, seperti penuturan oleh McAdam, dimana Peluang politik dapat muncul apabila suatu kebijakan pemerintahan tidak sesuai dengan kehendak masyarakat atau tidak dilaksanakan oleh pemerintahan dengan baik. Peluang itu muncul ketika Syaifudin Zuhri menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kesewenang-wenangan. Selain tidak adanya transparansi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, pada saat itu Syaifudin Zuhri melakukan penjualan tanah kas desa kepada pihak pengembang dimana Syaifudin Zuhri mengakui sebagai pemegang sah atas tanah kas desa tersebut. Hingga masyarakat yang sadar akan politik membentuk forum warga walaupun keberadaannya tidak efektif pada saat

itu dan akhirnya vakum.

Setelah Forum warga vakum, pada tahun 2006 dengan hadirnya pengeboran migas yang dilakukan oleh PT. Petrochina di desa Suci, yang dianggap merusak ketenangan masyarakat dan terdapat kecurangan didalamnya. Akhirnya terbentuk satu wadah baru untuk masyarakat yang dinamakan dengan FKWS (Forum Komunikasi Warga Suci), dalam pemberian nama tersebut sempat bersitegang antara ANSHOR dan Jouhan Farhad.

Perjuangan yang dilakukan FKWS dalam kasus pengeboran Petrochina ini membuahkan hasil. Dengan keberhasilan yang dicapai, FKWS sempat vakum karena kondisi desa dapat dikatakan stabil kembali. Hingga muncul kembali dalam permasalahan pada tahun 2010 yaitu perebutan tanah negara antara Pemerintahan Kabupaten Gresik dengan pemerintahan desa Suci. Dalam kasus ini dirasakan Jouhan Farhad selaku ketua FKWS pemerintahan desa dapat menangani sendiri, karena pemerintahan desa yang baru sebagian besar adalah anggota FKWS. Namun adanya tekanan dari Pemerintahan Kabupaten Gresik yang mempunyai kekuatan besar, akhirnya pemerintah desa Suci meminta bantuan FKWS, dan FKWS kembali melakukan aksinya untuk memperjuangkan hak masyarakat desa.

Gerakan FKWS di nilai masyarakat cukup efektif dalam melakukan segala tindakannya untuk masyarakat desa. Dari cara untuk meyakinkan masyarakat atas segala bentuk kecurangan yang ada, dimana berawal dari isu-isu yang terus berkembang sehingga menjadikan sebuah 'gossip' belaka. Untuk itu FKWS mencoba menyusun serta menganalisa isu-isu tersebut untuk menjadi pemahaman atas kebenaran yang ada, walaupun dalam meyakinkan keyakinan masyarakat tidaklah mudah dan perlu perjuangan. Selanjutnya, dinamika gerakan FKWS dalam memobilisasi dan mencari massa tidak begitu saja mempunyai massa yang besar seperti saat ini. Pada saat itu hanya memiliki massa segelintir orang dan seiring berjalannya waktu gerakan FKWS memiliki pasukan armada dalam jumlah yang besar. Gerakan FKWS ini sepakat untuk membentuk suatu koordinasi wilayah mengingat Desa Suci ini wilayah yang cukup luas, dimana terdapat sembilan wilayah dengan jumlah penduduk yang mencapai ribuan. Ini merupakan suatu dinamika perjalanan gerakan

FKWS dalam memobilisasi massanya. Tujuan gerakan FKWS di sepakati untuk membentuk koordinasi wilayah (Korwil) adalah agar lebih efektif dalam mencari serta merekrut massa untuk dapat berjuang bersama dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Suci.

Dalam pembentukan koordinasi wilayah ini tidak hanya melibatkan ketua RT atau RW untuk dijadikan sebagai koordinasi wilayah, tetapi dalam pembentukannya ini di pilih orang-orang yang sekiranya mampu merekrut massa sebanyak-banyaknya dan setidaknya mempunyai nama serta disegani oleh masyarakat sehingga ia dapat di jadikan sebagai koordinasi wilayah. Nama yang terpilih ini adalah murni masyarakat yang sangat peduli terhadap desa Suci. Dalam memobilisasi masyarakat, banyak cara yang dilakukan oleh setiap koordinasi wilayah. Yang mana cara itu dilakukan sebaik mungkin agar tujuannya tercapai, yaitu mampu meyakinkan masyarakat tentang keadaan dan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya terjadi di desa Suci atas kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh mantan kepala desa, kemudian bersama-sama menggugat mantan kepala desa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Suci seperti pengeboran yang di lakukan oleh PT. Petrochina, perebutan tanah Negara antara pemerintahan desa dengan Pemerintah Kabupaten Gresik hingga tercuatnya kembali kasus jual beli tanah kas desa tahun 2003-2004 ini koordinasi wilayah mempunyai cara-cara tersendiri agar kepercayaan masyarakat terbangun yaitu dengan melakukan suatu pembingkaian. Seperti penuturan oleh David Snow di dalam dinamika gerakan bahwa proses pembingkaian diartikan sebagai upaya-upaya strategis secara sadar oleh kelompok-kelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri yang mengabsahkan dan mendorong aksi kolektif.

Gerakan FKWS ini sampai saat ini masih tergolong efektif melakukan perjuangannya, karena kasus perebutan tanah negara antara pemkab Gresik dengan pemerintahan desa Suci hingga saat ini belum menemukan titik temu. FKWS akan terus melakukan aksi-aksi perlawanannya hingga tanah negara tersebut menjadi tanah kas desa bukan sebagai aset

pendapatan pemerintah Kabupaten Gresik.

Terbukti pada awal bulan Desember tahun 2012 FKWS melakukan aksi besar-besaran untuk memperjuangkan kasus perebutan tanah negara yang belum menemukan titik temunya ini. Karena makna dari gerakan sosial adalah suatu bentuk perlawanan dari kaum-kaum yang tertekan dan hidupnya didasari oleh rasa ketidakadilan dan kekecewaan yang mendalam untuk menuntut suatu perubahan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

KESIMPULAN

Dari temuan data yang didapat dalam penelitian berjudul, "Warga menggugat: Studi kasus gerakan Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik", maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Gerakan massa di desa Suci dilatarbelakangi oleh kesewenangan-wenangan yang dilakukan oleh perangkat desa Suci, dimana membuat masyarakat desa Suci kehilangan kepercayaan dan mengalami ketidaknyamanan terhadap kepemimpinan kepala desa Suci. Hal ini menyebabkan munculnya *Structural strain* (ketegangan struktural) yang terjadi di desa Suci dimana warga desa Suci mulai menggalang massa untuk menjatuhkan kepemimpinan Syaifudin Zuhri selaku kepala desa Suci yang memimpin pada saat itu. Kemudian muncul berbagai permasalahan, mulai dari masuknya pengeboran migas oleh PT. Petrochina yang terdapat manipulasi data yang dilakukan Syaifudin Zuhri. Warga merasa tidak pernah diikutsertakan dalam sosialisasi mengenai kedatangan PT. Petrochina tersebut, sehingga warga membentuk Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS). Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) mulai melakukan pertemuan rutin di warga desa Suci untuk menyatukan pikiran. Perkembangan gerakan massa ini telah memasuki tahap *The Growth of Generalized Belief*. Setelah kasus ini selesai, muncul kasus lain yaitu tentang perebutan tanah negara antara pemerintahan desa Suci dengan Pemerintah Kabupaten Gresik. Terjadi demonstrasi massa di desa Suci yang dipelopori oleh Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) untuk menuntut keadilan.

2. Upaya Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) memunculkan kembali kasus jual beli tanah kas desa pada tahun 2003 adalah suatu

titik jenuh masyarakat akibat kesewenangan-wenangan yang terjadi di desa Suci dimana Syaifudin Zuhri terlibat didalamnya. Walaupun beberapa kali FKWS melakukan kompromi secara kekeluargaan dengan Syaifudin Zuhri agar bersedia menyerahkan diri kepada pihak berwajib atas segala kesalahan yang dilakukan, tetapi itikad baik tersebut tidak dilaksanakan, hingga FKWS tak segan-segan menyeret kasus Syaifudin Zuhri ke jalur hukum. Upaya ini membuahkan hasil yang memuaskan bagi warga. Warga yang ingin memenjarakan Syaifudin Zuhri atas segala kesewenangan-wenangan yang dilakukan akhirnya tercapai. Menurut Baldrige terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk melakukan gerakan yaitu meyakinkan kesadaran, membangun gerakan yang kuat serta melaksanakan aksi dirasakan mudah karena memang massa sudah terbentuk dari kasus-kasus terdahulu seperti masuknya pengeboran Petrochina dan perebutan tanah negara. Ditambah lagi upaya FKWS dalam mengumpulkan data, bukti serta saksi yang kuat semakin meyakinkan warga untuk bergabung dalam aksi kolektif. Walaupun FKWS berhasil memenjarakan Syaifudin Zuhri, namun hasil vonis yang didapat tidak sesuai dengan harapan.

3. Forum Komunikasi Warga Suci (FKWS) yang terbentuk dari seluruh element masyarakat dimana tidak sejalan dengan kepemimpinan Syaifudin Zuhri dan difasilitasi oleh Anshor. Dinamika FKWS dari awal perjalanannya hingga saat ini dapat dikatakan cukup efektif walupun sempat mengalami vakum selama tiga tahun dan mencuat kembali pada saat terjadi perebutan tanah negara di desa Suci. Dalam memobilisasi massa pun FKWS tergolong mudah, karena telah membentuk koordinasi wilayah yang memudahkan FKWS dalam merekrut massa, sehingga massa terus bertambah di setiap aksinya. Hingga saat ini FKWS masih memperjuangkan hak-hak warga desa untuk menjadikan tanah negara menjadi tanah kas desa. Menurut McAdam, ada tiga aspek yang mempengaruhi dinamika gerakan sosial yaitu peluang atau kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses pembingkaihan.

SARAN

Terdapat beberapa saran dalam laporan penelitian ini:

1. Diharapkan dengan diangkatnya permasalahan yang terjadi di desa Suci ini

- maka akan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa khususnya masyarakat desa Suci. Dimana dapat menambah wawasan secara akademik kepada warga tentang gerakan sosial politik yang biasanya dipandang sebagai tindakan atau aksi yang brutal tanpa mengerti tujuannya melakukan gerakan. Sehingga warga mengerti bahwasanya sekelompok orang melakukan gerakan itu karena mempunyai tujuan tertentu dan agar warga mengerti faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan aksi perlawanan, dimana diperkuat dengan adanya teori yang mendukung.
2. Penelitian ini di harapkan mampu membuka pikiran warga desa Suci untuk semakin sadar akan politik, dimana apabila terjadi suatu kesewenangan-wenangan yang dilakukan oleh pemimpin mereka serta permasalahan yang terjadi. Sehingga warga Suci lebih berani memperjuangkan hak-haknya.
 3. Saran peneliti kepada gerakan FKWS agar terus memperjuangkan hak-hak warga Suci apabila terjadi permasalahan di desa Suci dan terus memperjuangkan tanah negara untuk dapat dijadikan sebagai aset pendapatan desa.
 4. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang gerakan sosial di pedesaan diharapkan mampu dalam menguasai bahasa jawa, karena masyarakat desa terkadang logat jawanya masih kental. Dan dalam melakukan wawancara kepada informan diharapkan tidak menggunakan bahasa ilmiah yang tertalu tinggi, karena informan akan merasa kesulitan dalam menjawab apa yang kita pertanyakan.
- Mirsel, Robert. 2004. *Teori pergerakan Sosial*. Yogyakarta: Resist book.
- Schulte Nordholt, Nico. 1987. *OJO DUMEH, Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Dharma Aksara Perkasa.
- Soenyono. 2005. *Teori-teori Gerakan Sosial, Suatu Perbandingan dari Berbagai Perspektif*. Surabaya: Yayasan Kampusina.
- Singh, Rajendra. 2010. *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist book.
- Suharko. 2006. *GERAKAN SOSIAL, aktor, hambatan dan tantangan gerakan sosial di Indonesia*. Malang: Program penguatan simpul demokrasi.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Quarles Van Ufford, Philip. 1988. *Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program*. Jakarta: PT. Gramedia.
- <http://www.anneahira.com/korupsi-kolusi-dan-nepotisme.htm> diakses pada hari Jumat, 06 Mei 2012 jam 21.30 WIB.
- <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=8797&l=pengawasan-kurang-kepala-desa-di-gresik-banyak-tersangkut-kasus-korupsi>, diakses pada hari Jumat, 06 Mei 2012 jam 21.25 WIB.
- <http://www.suara-giri.com/2011/10/didemo-warga-suci-kejaksanaan-baru.html> diakses pada hari Jumat, 05 Mei 2012 jam 20.15 WIB.
- antarajatim.com. Di akses tanggal 17-11-12, pukul 12.38.
- Kompas.com. Di akses tanggal 17-11-12, pukul 12.38. jdih-gresik.net/perpu/file/perda/2000/PERDA_17_2000. Di akses tanggal 17-11-12, pukul 12.38.
- www.SuaraGiri.com. *Mantan Kades Suci Diadukan Ke Kejaksaan (Sabtu, 30 juli 2011)*. Di akses tanggal 17-11-12, pukul 12.38.
- www.beritajatim.com. *Lurah Sidokumpul Gresik Ditahan*. Di akses tanggal 17-11-12, pukul 12.25.
- WWW.SUARA-GIRI.COM. *Polemik Rebutan Tanah Desa Suci Kecamatan Manyar*. Di akses tanggal 17-11-12, pukul 14.15.
- www.suara-giri.com, *Kades Suci Didemo Warganya Tuntut TKD*. Di akses tanggal 17-11-12, pukul 14.27.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Heru. 2005. *Konflik Elit Politik di Pedesaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Horrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Pernada Group.
- Hoffer, Eric 1988. *Gerakan massa*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- Manan, Munafrizal. 2005. *Gerakan Rakyat Melawan Elite*. Yogyakarta: Resist book.
- Marsh, David dan Gerry Stocker. 2010. *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.

www.Suarakawan.com. Di akses tanggal 18-11-12, pukul 13.15.

Endnote

- 1 Heru Cahyono. 2005. *Konflik Elit Politik di Pedesaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 2 *www.Suara-Giri.com. Polemik Rebutan Tanah Desa Suci Kecamatan Manyar.*